KETERKAITAN PENGATURAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mulk Haeriah_10200120158

HTN-D

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Keterkaitan Hukum, Hukum Acara

ABSTRAK

Pokok permasalahan yang penting diteliti adalah seperti apa keterkaitan hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi pada Peraturan Mahkamah Konstitusi. UUD Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan UU. Makna frasa yang “diatur dengan” menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan materi itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi). Implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi berdasarkan suatu hasil teridentifikasi ada 3, diantaranya : ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaan tertib hukum. Akibat ketiga implikasi hukum tersebut maka penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah. Namun demikian mengingat asas kemanfaatan dan asas praduga rechtsmatig maka selama memberi mandat dan sampai dengan belum ada pembatalan Peraturan Mahkamah Konstitusi maka tindakan MK selalu harus dianggap benar. Putusan MK dalam kewenangan judicial review memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung, yang dapat dikualifikasi antara lain : Mengadili dan memutus pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang , mengadili dan memutus suatu peristiwa konkret, dan kinerja kelembagaan Mahkamah Agung.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada proses amandemen UUD 1945 yang ketiga MPR menempatkan satu fondasi dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan membentuk sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 :

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Keputusan politik MPR tersebut sangat fundamental mengingat pada awal kemerdekaan meskipun BPUPKI membahas pembentukan sebuah Mahkamah Konstitusi namun tidak sampai masuk dalam norma UUD 1945. Di dalam sidang BPUPKI, Mohammad Yamin menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi. Lembaga tersebut adalah constitutioneele geschil atau constitutional disputes. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu materieele toetsingrecht (uji materil) terhadap UU. Lembaga yang diusulkan mempunyai kewenangan tersebut adalah Mahkamah Agung. Namun Soepomo menyanggahnya dengan empat alasan bahwa :

- a) Konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan konsep pembagian kekuasaan (distribution of power),
- b) Tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang,
- c) Kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- d) Sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai judicial review.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya adalah untuk melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Salah satu materi muatan UUD Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penegak hukum dan keadilan. Kemudian berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 ditambah satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yakni memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Mahkamah Konstitusi didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK mendeskripsikan dalam visinya yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah

Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Ketentuan UU 12/2011 dan Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 jelas menentukan bahwa makna frasa “diatur dengan” dalam suatu perintah pendelegasian pengaturan lebih lanjut meliputi unsur :

- a. Harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan secara tersendiri;
- b. Tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi); dan
- c. Materinya tidak bercampur dengan materi lain yang tidak diperintahkan untuk diatur lebih lanjut.

Berdasarkan makna frasa “diatur dengan” tersebut maka terhadap ketentuan UUD 1945 Pasal 24C ayat (6) terkait hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur undang-undang maka seharusnya hukum acara Mahkamah Konstitusi itu diatur dengan suatu undang-undang dan tidak boleh disubdelegasikan ke peraturan yang lebih rendah. Norma yang dibentuk dalam batang tubuh UU 24 Tahun 2003 Pasal 86 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini”. dalam Pasal 86 tersebut tidak spesifik disebut “hukum acara”. Penyebutan hukum acara justru terdapat dalam bagian Penjelasan Pasal 86 yang berbunyi: “Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan Undang-Undang ini.” Penjelasan Pasal 86 UU 24 Tahun 2003 yang menyebutkan hukum acara menunjukkan bahwa penjelasan menimbulkan norma dan norma tersebut tidak sesuai dengan norma yang ada dalam batang tubuh.

Ketentuan yang ada adalah perintah pengaturan lebih lanjut terkait tata tertib sidang sebagaimana ditentukan Pasal 40 ayat (3) UU 24 Tahun 2003: “Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Mahkamah Konstitusi.” Perintah berikutnya adalah terkait tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (5) UU 8 Tahun 2011: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.” Terakhir adalah perintah mengatur lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan Pasal 27 A ayat (7) UU 8 Tahun 2011. . Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Padahal, penyempurnaan sistem hukum dan konstitusi merupakan prasarat untuk membangun negara demokrasi konstitusional di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Inti permasalahan yang akan dikaji adalah seperti apa keterkaitan/implementasi pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam suatu bentuk peraturan Mahkamah Konstitusi ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan teoretis (theoretical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum sekunder adalah dokumen-dokumen selain produk hukum yang memberikan informasi tambahan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain meliputi literatur penafsiran konstitusi serta hasil penelitian dan artikel ilmiah terkait dengan hukum acara MK.

PEMBAHASAN

A. Ketidakpastian Hukum (Lex Certa)

Hukum acara Mahkamah Konstitusi yang hanya diatur dalam suatu peraturan Mahkamah Konstitusi maka berimplikasi terhadap tidak adanya kepastian hukum. Sebagaimana yang diuraikan dalam latar belakang disini, hukum acara Mahkamah Konstitusi seharusnya diatur dengan undang-undang dan tidak boleh disubdelegasikan ke peraturan yang lebih rendah. Prinsipnya konsepsi Negara Hukum menghendaki tegaknya supremasi hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana di Indonesia dipandang sebagai asas legalitas yang bertolak dari ide/nilai dasar kepastian hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya". Prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege punali* yang mengalami perkembangan atau penghalusan sebagai *nullum delictum sine ius* yang merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum. Dalam Putusan MK Nomor 067/PUU-II/2004 terkait pengujian UU 5/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diucapkan pada tanggal 15 Februari 2005, MK berpendapat bahwa:

"Namun di pihak lain, telah nyata bagi Mahkamah bahwa pembentuk undang-undang tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya yang berakibat pada timbulnya inkonsistensi antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya. Inkonsistensi demikian telah menimbulkan keragu-raguan dalam implementasi undang-undang bersangkutan yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum, keadaan mana potensial menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ..."

Peraturan MK yang mengatur hukum acara MK juga berpotensi menimbulkan pertentangan antara substansi pasal dari Peraturan MK dengan suatu undangundang dan penjelasannya. Pertentangan tersebut akan mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Masalah lainnya adalah terkait dengan jenis putusan dalam putusan perselisihan hasil pemilu. Dalam Pasal 77 UU MK, amar putusan MK hanya berupa menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dikabulkan, dan ditolak. Ketentuan tersebut disimpangi Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan menambahkan adanya jenis putusan baru yang disebut Ketetapan dengan amar ketetapan yang berbunyi:

“Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali”; dan

“Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”

B. Pelanggaran Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Perlu diketahui, hierarki peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai terendah adalah UUD Tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Mengetahui hierarki ini penting untuk menghindari peraturan perundang-undangan yang disusun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 mengukuhkan makna frasa “diatur dengan” yakni diyakini bahwa dari segi teknik perundang-undangan, frasa “diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Di samping itu, frasa “diatur dengan undang-undang” juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan UU 12/2011 dan Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 jelas menentukan bahwa makna frasa “diatur dengan” dalam suatu perintah pendelegasian pengaturan lebih lanjut meliputi unsur:

- a. harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan secara tersendiri;
- b. tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi); dan
- c. materinya tidak bercampur dengan materi lain yang tidak diperintahkan untuk diatur lebih lanjut.

Berdasarkan UU 12/2011, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam konteks hierarki, tata hukum digambarkan sebagai sebuah piramida dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan peraturan yang berada di bawahnya merupakan penjabaran dari konstitusi itu. Sementara itu, pandangan kedua digagas Satjipto Rahadjo, yang mengutip pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa, *"this regressus is terminated by a highest, the basic norm..."* (rangkaian pembentukan hukum diakhiri oleh norma dasar yang tertinggi). Hierarki tata hukum digambarkan sebagai piramida terbalik, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi berada berada di dasar piramida. Pandangan ini lebih bersifat fungsional.

Hal yang sama bahwa pembentukan norma yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan rangkaian pembentukan hukum ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yakni konstitusi. Artinya konstitusi merupakan norma abstrak yang perlu dijabarkan dan diuraikan dalam produk-produk hukum yang berada di bawahnya (*concretisering process*). Dalam upaya menjaga agar produk hukum yang berada di bawah konstitusi, maka terdapat suatu kaidah yang berfungsi untuk menjaga agar suatu produk hukum yang dibuat ini memiliki koherensi, konsistensi, dan korespondensi serta tidak bertentangan dengan konstitusi baik itu dalam segi perspektif formil maupun materiil. Teori ini bermula dari suatu analisis hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa karakter dinamis dari sistem normatif dan fungsi norma dasar mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum. Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat suatu norma hukum lainnya, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma lainnya tersebut. Dengan demikian suatu norma hukum itu valid karena dibuat menurut cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum lainnya, dan norma hukum lainnya ini adalah landasan validitas norma hukum yang disebut pertama.

menurut Hans Kelsen, norma-norma hukum itu berjenjangjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Kemudian merujuk pada Adolf Merkl, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya. Sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus pula. teori Adolf Merkl tersebut, dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu

berdasar dan bersumber pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. membahas masalah struktur norma dan struktur lembaga, kita dihadapkan pada teori yang dikemukakan oleh Benyamin Akzin yang ditulis dalam bukunya yang diberi judul *Law, State, and International Legal Order*. Benyamin Akzin mengemukakan bahwa pembentukan norma-norma hukum Publik itu berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum Privat karena apabila kita lihat pada struktur norma (Norm Structure) maka hukum Publik itu berada di atas hukum Privat, sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga (*Institutional Structure*), maka *Public Authorities* terletak di atas population.

Oleh karena norma-norma hukum Publik itu dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, sebenarnya pembentukannya harus dilakukan secara lebih berhati-hati, sebab norma-norma hukum Publik ini harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat, jadi berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum Privat. Norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Tetapi Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok.

Kelompok I ***Staatsfundamentalnorn*** (Norma Fundamental Negara)

Kelompok II ***Staatsgrundgesetz*** (Aturan Dasar/Pokok Negara)

Kelompok III ***Formell Gesetz*** (Undang-Undang 'formal')

Kelompok IV ***Verordnung & Autonome Satzung*** (Aturan pelaksana dan aturan otonom).

C. Ketiadaan Tertib Hukum

Sebagaimana juga telah diuraikan dalam latar belakang, hukum acara Mahkamah Konstitusi seharusnya diatur dengan undang-undang dan tidak boleh disubdelegasikan ke peraturan yang lebih rendah. Hukum acara Mahkamah Konstitusi yang hanya diatur dalam suatu peraturan Mahkamah Konstitusi maka berimplikasi terhadap ketiadaan tertib hukum dalam penyelenggaraan negara hukum Republik Indonesia. Undang-Undang harus diposisikan sebagai instrumen yang harus ditegakkan sebagai konsensus social.

- **Hamid S. Attamimi** memberikan pengertian tertib hukum (***rechtsordnung***) sebagai sebuah kesatuan hukum objektif yang keluar tidak bergantung kepada hukum yang lain, dan ke dalam menentukan semua pembentukan hukum dalam kesatuan tertib hukum tersebut. Rumusan ini sangat penting dalam menentukan ada atau tidak adanya kesatuan yuridis dalam suatu tertib hukum.
- **Soehino** mendefinisikan tertib hukum adalah tertib yang terdiri atas berbagai macam peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis dari peraturan yang tingkatannya dan/atau derajatnya tertinggi sampai dengan peraturan yang tingkatannya dan/atau derajatnya terendah.
- **J. H. A. Logemann** mengatakan bahwa sama seperti tertib masyarakat, yang merupakan keseluruhan yang saling berkaitan, juga hukum positif, yang ditentukan dengan mengabstraksikan dari suatu keseluruhan, suatu pertalian norma-norma, ialah suatu

tertib hukum. Dengan demikian, dalam hukum positif tidak terdapat norma-norma yang saling bertentangan.

Pentingnya Undang-Undang untuk mengatur hukum acara MK adalah juga untuk memperkuat kekuatan hukum eksekusi putusan MK. Selama ini permasalahan yang muncul ketika putusan MK membutuhkan tindak lanjut untuk merealisasikannya, dan menjadikan institusi lain untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Faktanya, kekuatan final dan mengikat putusan MK tidak dapat diimplementasikan secara konkret (*non-executable*) dan hanya mengambang (*floating execution*).

KESIMPULAN

Implikasi hukum pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu:

1. Ketidakpastian Hukum (*Lex Certa*). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi seharusnya diatur dengan undang-undang dan tidak boleh disubdelegasikan ke peraturan yang lebih rendah. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi saat ini hanya diatur dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang hanya diatur dalam suatu peraturan Mahkamah Konstitusi maka berimplikasi terhadap tidak adanya kepastian hukum. Seharusnya demi kepastian hukum maka hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang yang khusus (*lex specialis*).
2. Pelanggaran Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang hanya diatur dalam suatu peraturan Mahkamah Konstitusi maka berimplikasi pada pertentangan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan MK yang mengatur hukum acara MK bertentangan dengan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 yang menentukan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MK yang diatur dengan undang-undang.
3. Ketiadaan Tertib Hukum. Hukum acara Mahkamah Konstitusi seharusnya diatur dengan undang-undang dan tidak boleh disubdelegasikan ke peraturan yang lebih rendah.

Akibat ketiga implikasi hukum tersebut maka akibat hukum terhadap penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah. Namun demikian mengingat asas kemanfaatan dan asas praduga *rechtsmatig* maka selama memberi mandat dan sampai dengan belum ada pembatalan Peraturan Mahkamah Konstitusi maka tindakan MK selalu harus dianggap benar. Bagi Mahkamah Konstitusi sebaiknya segera menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara MK. Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar dalam pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang saat ini ada perlu dicabut dan materi muatannya masuk ke dalam RUU dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

Fadjar, A. Mukhtie, 2004, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayumedia.

Thalib, Abdul Rasyid, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Marilang, 2017, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif", Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni.

Prang, Amrizal J., 2011, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 53, Th. XIII, April.

Atamimi, A. Hamid S., 1992, Teori Perundang-undangan Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 25 Agustus.

Achmad Ali, 2005, "Menguak Tabir Hukum", Sinar Harapan.

Sidharta, B. Arief, 1995, Implementasi Hukum Dalam Kenyataan (Suatu Catatan tentang Penemuan Hukum), dimuat dalam Majalah Hukum Pro. Justitia, Tahun XIII, No. 3, Juli.

<https://setkab.go.id/apayangperlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan/>

<https://journal.unhas.ac.id/index.php/aqil/article/view/7312/4018>